

RAGAM STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. Afif Rifai MS
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Agustus 2020

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan di D.I Yogyakarta mengalami penurunan, namun jumlah penduduk yang rentan kemiskinan masih cukup banyak. Selain itu telah ada upaya pemberdayaan masyarakat dari pemerintah seperti PDM-DKE, KUMANIS, PEM, ALSINTAN, PEMP, dan LKM. Namun sayangnya masih terfokus pada kegiatan formal administratif sehingga unsur lain dalam pelaksanaan program masih terabaikan. Maka penting untuk menelaah berbagai macam strategi pemberdayaan masyarakat yang telah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini sumber utama data ialah jurnal atau artikel yang telah diterbitkan baik yang telah dilampirkan dalam website penerbit atau sudah dicetak. Adapun berbagai macam strategi pemberdayaan yang telah diimplementasikan di D.I Yogyakarta yaitu: pembentukan koperasi usaha, bantuan dari tim advokasi, pelaksanaan PKK, pengelolaan objek wisata dan pengelolaan sampah mandiri. Strategi tersebut dapat diterapkan di tempat lain jika memiliki sumberdaya dan tujuan yang sama.

Kata kunci: strategi, program, pemberdayaan masyarakat

Abstract

DIFFERENCES OF COMMUNITY EMPOWERMENT STRATEGIES IN YOGYAKARTA. Community empowerment is one of the efforts to alleviate poverty. Although the poverty rate in D.I Yogyakarta has decreased, the number of people who are vulnerable to poverty is still quite large. Besides, there have been community empowerment efforts from the government

such as PDM-DKE, KUMANIS, PEM, ALSINTAN, PEMP, and LKM. Unfortunately, it is still focused on formal administrative activities so that other elements in program implementation are still neglected. So it is important to examine various kinds of community empowerment strategies that have been proven to be able to alleviate poverty and achieve the expected goals. This research is library research. In this study, the main data sources were published journals or articles that were either attached to the publisher's website or printed. There are various kinds of empowerment strategies that have been implemented in D.I. Yogyakarta, namely: the establishment of business cooperatives, assistance from the advocacy team, implementation of PKK, management of tourist objects, and waste management. The strategy can be applied elsewhere if it has the same resources and objectives.

Keywords: strategies, programs, community empowerment

A. Pendahuluan

Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan terus dilakukan melalui berbagai macam program baik dari pemerintah maupun dari peran masyarakat itu sendiri. Menurut data statistik kemiskinan DIY tahun 2019, jumlah penduduk miskin di desa pada tahun 2014 berjumlah 208,150 jiwa. Akan tetapi pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 220,570 jiwa. Namun, pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 197,230 jiwa. Demikian halnya di tahun 2017 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 179,510 jiwa. Di tahun 2018 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 154,860 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya mengentaskan kemiskinan di kabupaten atau kota Yogyakarta membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Akan tetapi upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin perlu mengalami penyesuaian agar memudahkan proses implementasinya (Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019).

Menurut OECD tahun 2015 dalam Statistik Kemiskinan D.I Yogyakarta menegaskan bahwa meskipun jumlah penduduk yang berhasil dientaskan dari

kemiskinan mengalami kenaikan, jumlah penduduk yang rentan terhadap kemiskinan masih cukup banyak (Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019). Salah satu upaya untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan ialah melalui pemberdayaan masyarakat (Haris, 2014). Pemerintah juga telah mengupayakan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program seperti Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Kumanis (Kredit Usaha Masyarakat Terkena Krisis), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), bantuan Alsintan (alat mesin pertanian), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), serta penyertaan modal bagi koperasi dan Lembaga keuangan masyarakat (LKM).

Akan tetapi fokus program tersebut tidak lebih hanyalah kegiatan formal administrasi pemerintah sehingga unsur-unsur penting dalam pelaksanaan program terabaikan (Putera, 2007). Haris (2014) memaparkan bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara optimal diperlukan proses yang cukup panjang serta tenaga atau fasilitator yang ahli didalamnya. Maka perlu ditelaah kembali strategi pemberdayaan masyarakat yang telah diimplementasikan di Yogyakarta untuk mengidentifikasi strategi dan metode apa saja yang berhasil memberdayakan masyarakat. Identifikasi strategi tersebut dapat menjadi acuan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang akan datang di lokasi yang membutuhkan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan Masyarakat

Saut M. Lubis dalam Siti Zuliyah (2010) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan membuka kesempatan untuk memilih yang berarti meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuka kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan keputusan kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yaitu memandirikan masyarakat agar dapat menghadapi berbagai tantangan di kehidupannya.

(Mustangin & Desy Kusniawati, 2017). Menurut Irwin dalam L. Hayar Satar (2002) pemberdayaan merupakan sebuah proses dengan memberikan kesempatan dan membuat berbagai kontribusi dalam bentuk wawasan, ketrampilan, energi, atau dalam bentuk perhatian kepada sesama (Zuliyah, 2010).

Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita mencakup pengertian pembangunan masyarakat atau *community development* dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau *community-based development* (H Abdul Malik, 2019). Pemberdayaan masyarakat adalah proses memfasilitasi dan mendukung masyarakat agar mampu memposisikan diri secara profesional dan mampu memanfaatkan lingkungan strategis untuk jangka panjang (H Abdul Malik, 2019). Menurut Mardikanto (2014) dalam (H Abdul Malik (2019) Pemberdayaan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan ekologi. Selain itu Mardikanto (2012) berpendapat bahwa orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirianya, bahkan hal tersebut merupakan sebuah keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri. Selain itu hal tersebut merupakan kumpulan dari pengetahuan, ketrampilan, serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan external (H Abdul Malik, 2019).

Zubaedi (2013) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mengangkat harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang berada di kondisi kurang mampu. Sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat tersebut mereka mampu untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan usaha untuk meningkatkan potensi masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan kemampuan tersebut menjadi tindakan yang nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang mana memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai social.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau hanya sekedar memberantas kemiskinan (H Abdul Malik, 2019).

Usaha dalam memberdayaan masyarakat harus meletakkan masyarakat itu sendiri sebagai actor utama dan juga memberikan dukungan baik berupa bantuan ekonomi maupun membekali masyarakat dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan (Zuliyah, 2010). Krtasasmita (1997) dalam Mustangin et al. (2017) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a. Menciptakan sebuah kondisi dimana masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya (*enabling*). Setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi yang telah dikuasai masyarakat tersebut (*empowering*). Dalam tahap ini masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki mereka.
- c. Pemberdayaan juga berate melindungi potensi masyarakat tersebut. Sebagai contoh, mengupayakan agar masyarakat mampu untuk terus mengembangkan potensi mereka.

Loekman Soetrisno dalam Siti Zuliyah (2010) Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila pemberdayaan tersebut mampu mengurangi jumlah orang miskin, mampu memfasilitasi perkembangan masyarakat dan menumbuhkan kemampuan serta kemauan masyarakat desa untuk mandiri.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Andi Haris (2014) memaparkan beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah agar seseorang atau suatu kelompok masyarakat memiliki

kebebasan dalam hidupnya. Tujuan kedua adalah melalui pemberdayaan masyarakat, masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia agar mampu keluar dari garis kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keterbelakangan lainnya. Tujuan ketiga ialah masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan mereka. Tujuan yang keempat adalah meningkatnya kualitas masyarakat seperti tumbuhnya etos kerja, bersikap hemat, efisien, efektif, dan akuntabel (Haris, 2014).

Mardikanto dalam Masrukin et al. (2013) menyebutkan bahwa pemberdayaan memiliki tujuan yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa memiliki berdampak positif seperti (berdesa, 2019): (1) membantu masyarakat mandiri secara ekonomi, (2) membantu usaha menjadikan perekonomian yang besar dan modern, (3) merubah struktural dalam ekonomi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern yang mana perubahan struktural dapat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan yang mengatur ekonomi masyarakat, penguasaan teknologi and pemberdayaan sumber manusia, (4) terjadinya kerjasama yang baik, dan (5) mendukung munculnya entrepreneur baru.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto Totok dan Poerwoko SOebianto dalam Rahmatulliza (2017) dalam Bahri (2019) mengemukakan bahwa strategi secara konseptual dimaknai dengan beragam pendekatan. Pertama ialah strategi sebagai sebuah rencana. Dalam hal ini strategi berarti sebuah acuan atau pedoman yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Kedua ialah strategi sebagai kegiatan. Strategi berarti upaya yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan pesaing demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga adalah strategi sebagai sebuah instrument. Ini bermakna bahwa

strategi digunakan sebagai pedoman sekaligus alat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Keempat strategi sebagai sebuah system. Hal ini bermakna bahwa strategi merupakan sebuah kesatuan rencana dan Tindakan-tindakan yang komperhensif dan terpadu yang diarahkan untuk menghadapi tantangan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kelima ialah strategi sebagai pola pikir. Strategi merupakan suatu Tindakan yang dilandasi oleh wawsan yang kuat tentang keadaan internal maupun eksternal serta kemampuan megambil keputusan untuk memilih alternative terbaik untuk memaksimalkan peanfaatan peluang yang ada (Bahri, 2019).

Menurut Suharto dalam Bahri (2013) pemberdayaan masyarakat dalam konteks pekerjaan social mencakup tiga aras atau matra. Aras pertama ialah aras mikro dimana pemerdayaan dilakukan terhadap klien secara individual melalui konseling, bimbingan, stress management, dan pencegahan krisis. Aras kedua ialah aras mezzo, dimana pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien sebagai media intervensi. Dalam scope ini pendidikan, pelatihan dan dinamika kelompok digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, ketrampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan problem solving. Aras yang ketiga adalah aras makro, dimana pemberdayaan diarahkan kepada cakupan lingkunagn yang lebih besar, seperti perumusan kebijakan, perencanaan social, dan manajemen konflik (Bahri, 2019).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan data-data kepustakaan sebagai suatu teori yang dapat dikaji dan ditelaah untuk memperoleh hipotesa atau konsp demi mendapatkan hasil yang objektif (Subagyo, 1999). Penilaian kepustkaan memiliki tujuan untuk memanfaatkan berbagai macam material yang terdapat dalam perpustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi (Mardalis, 1999). Hasil dari menelaah literatur digunakan untuk mengidentifikasi model-model pemberdayaan

masyarakat yang ada di Yogyakarta. Penelitian Pustaka tidak hanya mengumpulkan, membaca, dan mencatat literatur dari buku saja namun penelitian kepustakaan harus memperhatikan langkah-langkah, metode saat mengumpulkan data, membaca, dan mengolah bahan data penelitian (Khatibah, 2011).

Terdapat empat ciri utama penelitian pustaka yaitu peneliti berhadapan langsung dengan teks yang menjadi sumber data penelitian. Ciri yang kedua adalah penelitian Pustaka bersifat siap pakai yang berarti peneliti bisa langsung dilaksanakan tanpa harus pergi ke lapangan. Ciri yang ketiga adalah data penelitian umumnya merupakan sumber sekunder dalam artian data yang diperoleh merupakan sumber kedua bukan data original yang langsung didapatkan langsung dari lapangan. Ciri yang terakhir adalah kondisi data pustaka tidak terbatas ruang dan waktu (Zed, 2004)

Mestika Zed (2004) mengemukakan empat langkah penelitian kepustakaan. Langkah pertama ialah menyiapkan alat atau tool perelengkapan dalam penelitian, seperti laptop, kertas dan pulpen. Langkah kedua adalah menyusun bibliografi kerja. Bibliografi kerja merupakan catatan mengenai bahan utama yang digunakan menjadi sumber data penelitian. Langkah ketiga adalah mengatur waktu penelitian. Hal ini bergantung pada kesiapan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Langkah keempat adalah membaca dan membuat catatan penelitian (Zed, 2004). Dalam penelitian ini sumber utama data ialah jurnal atau artikel yang telah diterbitkan baik yang telah dilampirkan dalam website penerbit atau sudah dicetak. Penelitian ini terfokus pada jurnal yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Pembahasan

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Yogyakarta

Berbagai macam strategi pemberdayaan masyarakat telah diimplementasikan di beberapa daerah di Yogyakarta guna mengentaskan kemiskinan. Keberhasilan

tersebut didokumentasikan dalam bentuk artikel atau jurnal, sehingga dapat dipelajari dan ditelaah maupun menjadi sumber referensi untuk meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Setiap daerah di Yogyakarta memiliki potensi yang berbeda-beda untuk dikembangkan dan diberdayakan. Maka dari itu dalam studi ini akan dijelaskan mengenai beberapa strategi pemberdayaan masyarakat dari berbagai daerah di Yogyakarta yang terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dibawah ini akan dijabarkan berbagai macam program-program pemberdayaan masyarakat dengan berbagai strategi pemberdayaannya.

a) Pembentukan Koperasi Sebagai Induk Usaha

Model ini diterapkan di Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Model tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masrukin, Toto Sugianto, Bambang Suswanto, dan Ahmad Sabiq (2013) Model Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Desa tersebut terletak cukup dekat dengan gunung Merapi dengan jarak kurang lebih 8km. Pemberdayaan ini dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi masyarakat desa pasca meletusnya gunung Merapi. Pemberdayaan dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Langkah pemberdayaan tersebut diawali dengan melakukan pendampingan untuk mendapatkan akses permodalan dan memperluas pemasaran usaha.

Langkah kedua adalah mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi pembentukan Lembaga usaha Bersama dalam bentuk koperasi berbadan hukum. Langkah ketiga ialah pembentukan pengurus kelompok pengelola kendang sapi komunal di hunian tetap. Selanjutnya adalah perbaikan sarana dan prasarana untuk promosi dan juga pemasaran. Langkah kelima adalah pelatihan dan pembuatan website bagi tim promosi desa untuk membantu pemasaran produk. Langkah keenam dilaksanakan dengan memfasilitasi industry rumah tangga untuk mendapatkan ijin usaha dari departemen Kesehatan. Terakhir ialah menyediakan

lahan bagi penanaman rumput yang dapat menjadi sumber pakan sapi di zona larangan hunian yang terkena bencana. Koperasi yang dibentuk menjadi induk usaha terdiri dari dua tim yaitu tim pembentuk kelompok komunal peternak sapi dan kelompok promosi dan pemasaran (Masrukin, et al., 2013).

b) Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Oleh Tim Advokasi Arus Bawah (TAABAH)

Model pemberdayaan ini dilaksanakan di komunitas Ledhok Timoho, Balerejo 50/05 Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat ini adalah mengentaskan kemiskinan, memperbaiki pemukiman,, mengangkat harkat dan martabat manusia melalui mendirikan sekolah Gajah Wong, mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat, mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan menumbuhkan kemandirian masyarakat. Model pemberdayaan tersebut dijabarkan oleh Wahyuni (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Komunitas Ledhok Timoho Belerejo Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta. Implementasi pemberdayaan masyarakat oleh TAABAH meliputi tiga langkah-langkah penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Model kegiatan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat meliputi model yang bersifat pemberian atau donasi, model yang bersifat memberdayakan dan model yang bersifat advokasi. Model yang bersifat pemberian merupakan upaya memberikan bantuan berupa uang kepada masyarakat yang terkena musibah. Model pemberdayaan meliputi pemberian Latihan-latihan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan mampu untuk hidup mandiri.

Model advokasi meliputi pendampingan masyarakat mengenai tempat tinggal, masalah kesehatan dan lain-lain. Strategi pemberdayaan masyarakat meliputi mengembangkan sector informal yang lebih kental, mencari sebuah jaringan atau mitra kerja, memberikan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki

masyarakat, melakukan perlindungan kepada masyarakat, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat tersebut membuahkan hasil. (1) terwujudnya sarana prasarana yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat yaitu MCK umum, PAL, bak sampah, perbaikan rumah warga, berdirinya Gedung sekolah, perbaikan jalan, dan berdirinya sebuah mushola. (2) penguasaan ketrampilan baru masyarakat Ledhok Timoho. Ketrampilan tersebut meliputi ketrampilan membuat sabun, ketrampilan membuat tempe dan lain sebagainya. (3) terbentuknya sekolah Gajah Wong untuk anak-anak. (4) terbentuknya usaha baru seperti angkringan. (5) menambah pendapatan masyarakat dengan adanya usaha baru serta profesi baru. 70 % Masyarakat dulunya bekerja sebagai pemulung, pengemis dan pengamen, namun setelah adanya pemberdayaan masyarakat memiliki profesi baru seperti tukang becak, tambal ban, kuli bangunan dan lain sebagainya (Wahyuni, 2017).

c) Pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Program PKK merupakan upaya mensejahterakan masyarakat oleh pemerintah melalui pemberdayaan kaum perempuan. Program ini dilaksanakan di Kampung Demnagan RW 05, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Studi mengenai pemberdayaan masyarakat melalui PKK dilakukan oleh Saparwadi dan Suparman (2018). Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat melalui PKK ialah untuk menanggulangi kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan keluarga yang mandiri. Target utamanya ialah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). PKK Demangan merupakan perkumpulan ibu-ibu yang bergerak dibidang wirausaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) meliputi sosialisasi, fasilitasi, pemetaan tempat, perencanaan, dan pelaksanaan.

Sosialisasi dilakukan untuk menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya memiliki suatu kegiatan yang dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat terhadap kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Sosialisasi dilakukan melalui pengajian, perkumpulan RW, arisan Ibu-Ibu dan lain sebagainya. Fasilitasi dilakukan melalui memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan, terapi psikologis, dan penyadaran agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan sadar untuk berubah. Selanjutnya adalah pemetaan tempat. Pemetaan tempat pelaksanaan program dilaksanakan secara bergiliran dari rumah kerumah ibu-ibu anggota PKK. Langkah selanjutnya perencanaan. Perencanaan meliputi pembentukan kepengurusan PKK, melakukan studi banding ke PKK di daerah lain, mengikuti seminar dan keempat ialah mencari networking yang bisa diajak Kerjasama. Langkah selanjutnya ialah pelaksanaan. Pelaksanaan PKK dilakukan dengan menyelenggarakan sebuah program seperti arisan masyarakat, pelatihan pembuatan kerajinan sampah organik, dan pelatihan menumbuhkan jiwa kewirausahaan.

Program PKK jelas memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak hanya kebutuhan ekonomi sehari-hari akan tetapi juga kebutuhan batin berupa rasa senang dan puas karena memiliki kegiatan. Dampak kedua ialah jangkauan sumber produktif terwujud karena adanya usaha baru yang dijalankan oleh warga yang mampu menambah keseharian masyarakat. Dampak yang ketiga ialah partisipasi dalam proses pembangunan. Hal ini bermakna bahwa masyarakat telah mampu untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, dan mengambil keputusan sendiri tentang alternative pemecahan masalah yang mereka pilih (Suparwadi & Jayadi, 2018).

d) Community based tourism (pengembangan pariwisata berbasis masyarakat)

Community based tourism dikembangkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Sugi Rahayu, Utami Dewi, dan Kurnia Nurfitriana (2016). Community based tourism ialah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan pengembangan masyarakat melalui kepariwisataan daerah. Ada tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat yaitu mengikut sertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, adanya kepastian masyarakat local menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan dan pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat local.

Menurut Samsuri dalam Sugi Rahayu, Utami Dewi, dan Kurnia Nurfitriana (2016) menyebutkan prinsip-prinsip CBT yang meliputi (1) mengenali, mendukung dan mempromosikan kepemilikan, (2) melibatkan anggota masyarakat dari setiap pengembangannya, (3) mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas yang bersangkutan, (4) meningkatkan kualitas kehidupan, (5) menjamin keberlanjutan lingkungan, (6) melindungi ciri khas dan budaya masyarakat local, (7) mengembangkan pembelajaran lintas budaya, (8) menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia, (9) mendistributikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara profesional kepada anggota masyarakat, (10) memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat, dan (11) menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Upaya pemberdayaan masyarakat dengan CBT dilakukan melalui program pengembangan pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan kemitraan pariwisata. Pengembangan pariwisata adalah sebuah usaha untuk menata Kawasan dan kondisi obyek wisata serta menyediakan dan

melengkapi sarana-prasarana di tempat pariwisata. Program pengembangan pemasaran ditujukan untuk menginformasikan dan mempromosikan wisata yang terdapat di Kulon Progo baik di pasar wisata regional, nasional maupun internasional. Program pengembangan kemitraan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta pelaku pariwisata dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Potensi pariwisata di Kulon Progo meliputi wisata local budaya, wisata pertanian dan wisata alam dan lingkungan. Pengembangan CBT memiliki dampak positif seperti menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pelestarian lingkungan dan budaya masyarakat sekitar (Rahayu, et al., 2016).

e) Kelompok Pengelola Sampah Mandiri

Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok pengelola sampah mandiri. Kelompok ini bernama KPSM Ngudi Makmur yang dibentuk di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul DIY. Kelompok ini merupakan bagian dari action research yang dilakukan oleh Ambar Teguh Sulistiyani dan Yulia Wulandari dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Tujuan dari program ini ialah terbentuknya kelompok kecil pengelola sampah yang mampu memproduksi pupuk. Tahapan kegiatan pengelolaan sampah dimulai dengan penyadaran kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan sampah serta manfaatnya. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan ialah ceramah dan dialog kepada masyarakat tentang permasalahan sampah.

Tahap selanjutnya adalah pengilmuan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan ialah memberikan pengajaran berupa teori dan ketrampilan untuk mengelola sampah. Tahap yang ketiga ialah penerapan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan kelompok-kelompok pengelola sampah yang beranggotakan masyarakat desa Sitimulyo. Tahap yang terakhir adalah pengembangan. Di tahap ini kegiatan berisi pengorganisasian, pengayaan ilmu dan

ketrampilan. Dari tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pemberdayaan yang dilakukan mencakup motivasi, penyuluhan, edukasi, inisiasi kelompok serta pendampingan. Tahapan pemberdayaan tersebut berhasil dilakukan di Desa Sitimulyo dengan produksi produk pupuk organik serta terbentuknya organisasi KPSM Ngudi Makmur. Produksi pupuk terus meningkat seiring dengan pengutan organisasi yang telah bekerja sama dengan BLH Kabupaten Bantul (Sulistiyani & Wulandari, 2017).

Dari program tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap program dilaksanakan dengan menggunakan strategi yang berbeda-beda. Misalkan pada program yang pertama yaitu pembentukan koprasi utama di Desa Kepuharjo, Cangkringan Yogyakarta. Dalam program ini strategi yang digunakan diantaranya adalah pelaksanaan pendampingan, pelatihan dan fasilitasi. Pemilihan strategi pemberdayaan juga bergantung kepada tujuan dari pemberdayaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas, ada yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian pasca bencana alam ada juga yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan mengedukasi sehingga pola pikir masyarakat dan berubah dan berkembang kearah yang lebih baik. Tidak hanya itu tujuan lain pemberdayaan yang disebutkan diatas ialah memberikan rasa puas karena masyarakat memiliki profesi baru dan mampu berkarya.

Dari berbagai macam strategi diatas dapat disimpulkan beberapa metode yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pendidikan

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi mereka. Pendidikan bisa diberikan melalui berdirinya sebuah sekolah formal maupun non formal seperti PKBM

dan dibentuknya kelompok-kelompok belajar dalam masyarakat. Contohnya seperti berdirinya sekolah Gajah Wong.

2) Pelatihan

Pelatihan disini berupa upaya meningkatkan skill atau ketrampilan masyarakat pada bidang tertentu yang dapat membantu mereka untuk meningkatkan perekonomiannya. Sebagai contoh seperti pelatihan pengelolaan sampah menjadi pupuk, ternak sapi, pembuatan kerajinan dari sampah organik dan lain sebagainya.

3) Pendampingan

Pendampingan dilakukan setelah program pemberdayaan dilaksanakan. Masyarakat harus terus didampingi sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pendampingan dilakukan dengan cara memberikan pengawasan perkembangan program pemberdayaan, melakukan evaluasi program, dan membantu mengatasi permasalahan yang muncul jika masyarakat tersebut belum mampu untuk mengatasinya sendiri.

4) Pemberian Motivasi

Motivasi penting diberikan agar program masyarakat tetap semangat mengikuti program pemberdayaan dan memiliki kesadaran akan dampak positif dari program pemberdayaan tersebut.

5) Membangun jaringan atau mitra kerja

Bentuk real dari pemberdayaan masyarakat ialah terciptanya *networking* usaha masyarakat dengan usaha atau bisnis lain yang lebih besar maupun Lembaga yang dapat membantu perkembangan usaha milik masyarakat tersebut. Kemitraan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan usaha atau bisnis yang ditekuni. Selain itu kemitraan juga bermanfaat untuk keterserapan produk maupun tenaga dari masyarakat yang diberdayakan.

Selain strategi diatas masih ada banyak strategi lain yang juga mampu membantu pemberdayaan masyarakat Desa di Yogyakarta. Dalam sebuah program terdapat strategi pemberdayaan yang mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Ketercapaian kesuksesan sebuah program dibuktikan dengan tercapainya tujuan dari program tersebut. Setiap program memiliki tujuan yang berbeda untuk itu ukuran kesuksesan sebuah program juga berbeda-beda. Beberapa strategi diatas sudah terbukti mampu mengantarkan program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi pemberdayaan tersebut bisa digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat yang akan datang.

E. Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat juga dilaksanakan di berbagai pedesaan di D.I. Yogyakarta. Menurut beberapa studi diatas, program yang telah dilaksanakan berupa pembentukan koperasi usaha, bantuan dari tim advokasi, pelaksanaan PKK, pengelolaan objek wisata dan pengelolaan sampah mandiri. Dari lima program tersebut terdapat model pemberdayaan yang digunakan yaitu pendidikan, pelatihan, pendampingan, pemberian motivasi dan kemitraan serta networking. Program serta model pemberdayaan yang dijelaskan diatas telah terbukti mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Baik program maupun model pemberdayaan tersebut dapat diterapkan ditempat lain jika memiliki sumberdaya dan tujuan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019. *Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Bahri, E. S., 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.
- berdesa, 2019. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. [Online] Available at: [http://www.berdesa.com/6-sisi-positif-adanya-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-desa/](http://www.berdesa.com/6-sisi-positif-adanya-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-des/)
- H Abdul Malik, A. N. A. S., 2019. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal Melalui Pemanfaatan IPTEK. *Jurnal Balitbangda Provinsi Banten*, pp. 24-36.
- Haris, A., 2014. Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Media. *JUPITER Vol. XIII No. 2*, pp. 50-62.
- Khatibah, 2011. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 05 No. 01(5), pp. 36-39.
- Mardalis, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masrukin, Sugito, T., Suswanto, B. & Sabiq, A., 2013. Model Pemberdayaan Masyarakat Pasca Erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. *Jurnal Komunitas: Research & Learning in sociology and Anthropology*, pp. 172-184.
- Mustangin & Desy Kusniawati, N. P. I. B. S. P., 2017. Pemberdayaan asyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Bumiaji. *Sosiglobal jurnal pemikiran dan penelitian sosiologi*, pp. 60-70.
- Putera, R. E., 2007. Analisis terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Demokrasi*, Volume Vol. VI No. 1, pp. 37-60. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1131>
- Rahayu, S., Dewi, U. & Fitriana, K. N., 2016. Pemngembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 21, No. 1, pp. 1-13.
- Subagyo, J., 1999. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sulistiyani, A. T. & Wulandari, Y., 2017. Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Siti Mulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri. *Indonesian Journal of Community Engagement Vol. 02, No. 02*, pp. 146-162.
- Suparwadi & Jayadi, S., 2018. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kesejahteraan Keluarga di Demangan Yogyakarta. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 42, No. 01*, pp. 63-72.
- Wahyuni, 2017. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Komunitas Ledhok Timoho Balerejo Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta. *INJECT: Interdisciplinary Journal of Communication Volume 2, No. 2*, pp. 193-210.
- Zed, M., 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Zuliyah, S., 2010. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Menunjang Pembangunan Daerah. *Journal of Rural and Develoepment Vol I No. 2*, pp. 151-160.